

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas yang menyusun sebagian besar aktivitas bisnis dan penciptaan kesempatan kerja di Indonesia. UMKM mencakup semua jenis usaha, termasuk usaha kecil, individu, kelompok, dan rumah tangga yang menanganinya. Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, Indonesia memberi perhatian khusus pada UMKM dalam bidang ekonominya (Lubis & Salsabila, 2024). Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperkuat ekonomi lokal adalah pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM pada dasarnya adalah tanggung jawab kolektif antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, kontribusi dari masyarakat dan pemerintah sangat krusial dalam mempercepat kemajuan UMKM (Kamalaheng et al., 2025). Dengan semakin berkembangnya usaha, menuntut UMKM untuk menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan yang dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas.

UMKM sangat berperan penting dalam perkembangan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini . Kontribusinya dianggap sangat tinggi dan krusial karena UMKM menjadi salah satu yang menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia. Peran UMKM di Indonesia seperti menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sumber ekonomi lokal melalui hasil produksi dan membuka peluang usaha .Secara umum, UMKM cenderung memiliki sistem operasional yang sederhana dan fleksibel serta lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar (Istinasari et al., 2021).

2.1.2 Kriteria dan Klasifikasi UMKM

Kriteria Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, yang membahas usaha mikro, kecil, dan menengah, disebutkan bahwa kriteria UMKM meliputi beberapa hal (PPRI, 2021), yaitu:

1. Usaha Mikro

memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan usaha maksimal senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta memiliki penjualan tahunan maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Usaha Kecil

memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan usaha minimal senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) dan maksimal senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta memiliki penjualan tahunan minimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Usaha Menengah

memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan usaha minimal senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta memiliki maksimal penjualan tahunan minimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut (PPRI, 2021) :

1. "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."
2. "Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.“

3. "Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

2.2 Standar Akuntansi keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan UMKM (SAK EMKM) merupakan standar akuntansi yang berlaku bagi entitas yang memenuhi definisi entitas yang tidak bertanggung jawab secara publik sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP dan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Mikro dan Usaha Menengah (UMKM). SAK EMKM secara tegas menguraikan konsep dasar badan usaha, yang mengharuskan adanya pemisahan kekayaan pribadi pemilik

dari harta dan hasil usaha badan tersebut serta membedakan badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain IAI (2018).

Jika dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya, SAK EMKM dirancang untuk kesederhanaan, mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM dan terutama mengandalkan biaya historis sebagai dasar pengukuran. Oleh karena itu, entitas yang memenuhi kriteria kelayakan penggunaan SAK EMKM tetap harus menilai kesesuaian ketentuan dalam SAK EMKM untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangannya. Oleh karena itu, entitas harus mengevaluasi secara cermat kerangka pelaporan keuangan yang akan digunakan, baik berdasarkan SAK EMKM atau standar akuntansi keuangan lainnya, dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan SAK EMKM dan kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan entitas IAI (2018).

SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 24 Oktober 2016. SAK EMKM ini mulai diterapkan secara efektif sejak 1 Januari 2018, dirancang khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Standar ini menyederhanakan proses penyusunan laporan keuangan dengan

menggunakan basis kas atau akrual yang disederhanakan (Akbar et al., 2025).

Manehat & Sanda (2022) menjelaskan bahwa pembuatan laporan keuangan sesuai SAK EMKM untuk jenis usaha UMKM ditujukan untuk memudahkan UMKM dalam pencatatan keuangannya. Dalam laporan keuangan terstandar tersebut, UMKM dapat mengakui, mengukur dan menyajikan semua informasi akuntansi yang dibutuhkan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini dapat membantu UMKM dalam menghitung tarif, menentukan harga pokok dan harga jual suatu barang, serta mempermudah dalam mendapatkan subsidi (Valentin & Sosrowidigdo, 2024).

2.2.2 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menjelaskan bahwa SAK EMKM memiliki ruang lingkup yang mencakup :

1. SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah
2. Entitas mikro kecil dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut.

3. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam SAK ETAP jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk Menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.2.3 Jenis Jenis Laporan Keuangan dalam SAK EMKM

Penyajian laporan keuangan yang wajar membutuhkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, penyajian secara jujur, komparabilitas dan dapat dipahami. Dalam SAK EMKM laporan keuangan lengkap sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Dalam SAK EMKM Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode akhir. Laporan posisi keuangan entitas terdapat akun-akun meliputi:

1. Kas dan setara kas
2. Piutang
3. Persediaan
4. Hutang
5. Modal

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menggambarkan kejadian terkait segala biaya berupa penghasilan dan beban selama periode tertentu. Laba rugi adalah kinerja keuangan pada suatu periode dan mengatur informasi di dalam laporan laba rugi yang disajikan dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi meliputi akun-akun berikut:

- a.) Pendapatan
- b.) Beban Keuangan
- c.) Beban Pajak

Laporan laba rugi menyajikan akun yang relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut IAI (2016) Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM. Ketika menyajikan laporan keuangan, perusahaan dapat menyajikan komponen laporan keuangan yang lain, seperti laporan arus kas yang tidak wajib dicantumkan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, apabila dirasa penambahan laporan keuangan tersebut

dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pengguna laporan keuangan.

2.2.4 Pengukuran Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Pengukuran dalam hal ini adalah proses penetapan untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar Pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sejumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

2.2.5 Penyajian Wajar Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Menurut (IAI, 2016) ,penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai dengan persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. Penyajian wajar ini mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas , penghasilan, dan beban. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan

entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

a. Relevan

Informasi tersebut agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan harus yang bersifat relevan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi di masa lampau, masa kini dan masa depan.

b. Representasi

Informasi memiliki kualitas yang baik dapat disajikan secara tepat yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan dapat diandalkan oleh pemakainya.

c. Keterbandingan

Keterbandingan merupakan Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi dalam posisi keuangan.

d. Keterpahaman

Pemahaman dengan menyajikan informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna dapat mengetahui tentang aktivitas ekonomi dan mempelajari informasi tersebut dengan wajar dan memadai.

2.2.6 Kerangka Konsep Laporan Keuangan Pembukuan Sesuai Dengan SAK EMKM

SAK EMKM menjelaskan UMKM wajib membuat 3 laporan keuangan yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba-Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam SAK EMKM, laba rugi terdiri dari pendapatan, beban usaha, beban pajak penghasilan, dan laba rugi bersih setelah pajak, sedangkan laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas.

Tabel 1 Kerangka Laporan Laba Rugi SAK EMKM

LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (DALAM RUPIAH)	
PENDAPATAN :	(Rp)
Pendapatan usaha	XXX
Pendapatan lain-lain	XXX
JUMLAH PENDAPATAN	XXX
BEBAN	
Beban usaha	XXX
Beban lain-lain	XXX
JUMLAH BEBAN	XXX
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	XXX
Beban pajak penghasilan	XXX
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN	XXX

Sumber: Sak EMKM, (2018)

Tabel 2 Kerangka Laporan Posisi Keuangan SAK EMKM

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2025 (DALAM RUPIAH)	
ASET	(Rp)
ASET LANCAR	
Kas	XXX
Persediaan	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX
ASET TETAP	
Peralatan	XXX
Kendaraan	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	XXX
Jumlah Aset Tetap	XXX
JUMLAH ASET	XXX
LIABILITAS	
Utang Usaha	XXX
JUMLAH LIABILITAS	XXX
EKUITAS	
Modal Usaha	XXX
Saldo Laba	XXX
JUMLAH EKUITAS	XXX
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	XXX

Sumber: Sak EMKM (2018)

Tabel 3 Kerangka Konsep Catatan Atas Laporan Keuangan

PT WAHANA INTI MAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESMBER 2025	
1	Umum Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016 . Entitas bergerak dalam bidang distribusi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan Pala Raya Griya Mejasem Bar., Kec. Kramat , Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
2	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan yang disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dengan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah. c. Kas Kas dan setara kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Berikut Kas Masuk PT Wahana Inti Mas dalam periode th 2025: 31 Des 20X5

6	Saldo Laba Laba yang didapatkan oleh PT Wahana Inti Mas selama bulan Januari-Desember 2025 adalah sebesar Rp xxx setelah dikurangi dengan beban-beban.
----------	--

Sumber: Sak EMKM (2018)

2.3 Siklus Akuntansi

2.3.1 Pengertian Siklus Akuntansi

siklus akuntansi adalah versi yang lebih lengkap dan komprehensif dari proses akuntansi. Ini mencakup semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya akurat, tetapi juga siap untuk digunakan dalam periode akuntansi berikutnya. Pencatatan, analisis, pengumpulan, pengelompokan, klasifikasi, ringkasan, dan pelaporan transaksi menjadi informasi keuangan adalah semua bagian dari siklus akuntansi, yang mengacu pada proses pengelolaan pembukuan perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Husaini & Hutar, 2021). Siklus akuntansi tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan analisis transaksi, pencatatan dalam jurnal umum, pemindahan ke buku besar (posting), penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, serta diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan.

2.3.2 Tahapan Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Berikut ini penjelasan lengkap tentang setiap tahap :

1. Identifikasi Transaksi

Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi keuangan. Tidak semua aktivitas bisnis dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan. Hanya transaksi yang memengaruhi posisi keuangan perusahaan dan dapat diukur dalam satuan moneter yang dicatat. Misalnya, pembelian bahan baku, penjualan produk, atau pembayaran gaji karyawan termasuk dalam kategori ini.

2. Pencatatan Transaksi dalam Jurnal

langkah berikutnya adalah mencatat transaksi dalam jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis yang berisi detail setiap transaksi keuangan, termasuk tanggal, jumlah, dan akun yang terpengaruh.

3. Posting Buku Besar

Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memindahkan data ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya. Setiap rekening dalam buku besar memiliki nomor kode yang

memudahkan identifikasi dan pelacakan. Proses posting ini memastikan bahwa semua transaksi yang tercatat dalam jurnal telah dikelompokkan ke dalam akun-akun yang sesuai. Misalnya, semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan akan dikelompokkan dalam akun “Pendapatan Penjualan”, sementara transaksi pembelian akan dikelompokkan dalam akun “Pembelian”.

4. Penyusunan Neraca Saldo

Setelah semua transaksi diposting ke buku besar, langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo dari semua akun dalam buku besar pada suatu periode tertentu. Tujuan utama neraca saldo untuk memastikan bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Bila neraca saldo tidak seimbang, berarti ada kesalahan dalam pencatatan atau posting transaksi. Kesalahan ini harus segera diidentifikasi dan diperbaiki sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

5. Penyusunan Jurnal Penyesuaian

Pada akhir periode akuntansi, seringkali terdapat transaksi yang belum dicatat atau perlu disesuaikan. Misalnya, beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar, atau pendapatan yang telah diterima tetapi belum diakui. Untuk mengatasi hal ini, jurnal penyesuaian dibuat. Jurnal penyesuaian memastikan

bahwa pendapatan dan beban dicatat dalam periode yang sesuai, sesuai dengan prinsip akrual basis. Proses ini juga membantu memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian yang teridentifikasi dalam neraca saldo.

6. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo ini mencerminkan saldo akun setelah semua penyesuaian dilakukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan saldo akun sudah akurat.

7. Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan disusun. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi dan mencakup:

- a.) Laporan Laba Rugi: Menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu.
- b.) Laporan Perubahan Modal: Menjelaskan perubahan modal perusahaan akibat laba atau rugi.
- c.) Neraca: Menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu.
- d.) Laporan Arus Kas: Menunjukkan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu.

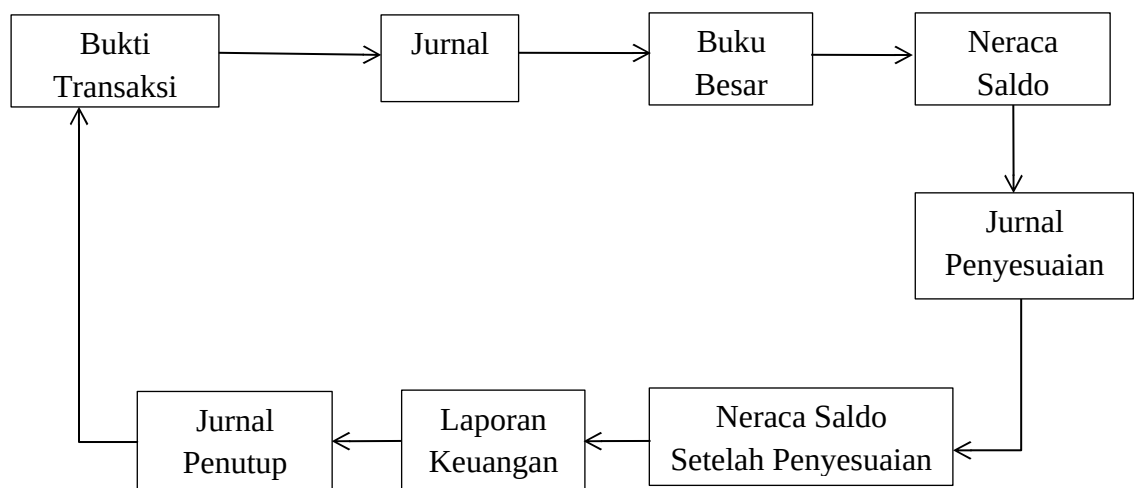
Laporan keuangan ini menjadi alat penting bagi manajemen, investor, dan pihak eksternal lainnya untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

8. Membuat Jurnal penutup

Pada akhir periode akuntansi, jurnal penutup dibuat untuk menutup rekening-rekening nominal, seperti pendapatan dan beban. Saldo dari rekening-rekening ini dipindahkan ke rekening modal. Tujuan jurnal penutup adalah untuk memastikan bahwa rekening nominal siap digunakan kembali pada periode berikutnya.

2.3.3 Gambaran Siklus akuntansi

Adapun tahapan dalam siklus akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Siklus Akuntansi

2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti terdahulu yang peneliti ambil sebagai penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Puja Fitratunnisa, Hery Astika Putra, Halpiah, (2025)	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK-EMKM (Studi Kasus pada CV. Almarn Ligurbar Farm).	Metode Deskriptif Kualitatif	Penerapan SAK EMKM mampu mengubah pencatatan sederhana menjadi laporan keuangan yang terstruktur, meningkatkan transparansi, serta membantu identifikasi kerugian usaha. CV mengalami rugi bersih Rp4.739.602 akibat dominasi biaya pakan dan tingginya kematian ayam.
2	Aula Mustaghifiroh , Tina Martini (2022)	Analisis Penerapan SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Kudus menghadapi kendala dalam penerapan SAK EMKM, seperti pencatatan transaksi kecil, penggolongan

NO	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Kabupaten Kudus).		biaya yang tidak terstruktur, serta keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman akuntansi, minimnya SDM yang kompeten, dan kurangnya pendampingan teknis. Meski demikian, UMKM yang menerapkan SAK EMKM merasakan manfaat berupa peningkatan transparansi, kemudahan pengambilan keputusan, serta akses pendanaan yang lebih baik.
3	Susilawati, Rina Riniawati, Rahma Sri Melati Putri	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa UMKM Pesona Batik telah melakukan pencatatan keuangan

NO	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(2025)	Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Pesona Batik Kota Sukabumi.		secara sederhana dengan fokus pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran dari kegiatan usaha. Pencatatan tersebut dilakukan secara manual dan belum mengacu pada kaidah akuntansi yang sistematis.
4	Sami ayu Lestari, yuni setia wati (2024)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada UD Nurul Barokah.	Metode Deskriptif Kualitatif	UD Nurul Barokah belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM). UMKM melakukan pencatatan keuangan tergolong sederhana, sehingga UMKM belum melakukan tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi secara sempurna. Bentuk laporan

NO	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				keuangan yang di sajikan oleh UMKM masih belum sesuai dengan SAK EMKM karena laporan keuangan yang disajikan hanya didominasi oleh pencatatan arus kas masuk dan keluar saja.
5	Muhammad Dimar Alam, Helmy Aulia Rahman, Areta Widya Kusumadewi (2023)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM dalam Pelaporan Keuangan PT Arta Royal Timeo.	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM belum menerapkan SAK EMKM secara optimal. Pencatatan keuangan masih sederhana , sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum lengkap dan belum mampu memberikan gambaran posisi keuangan secara menyeluruh.

Sumber: Data diolah (2026)